

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena migrasi pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan bagian dari dinamika globalisasi tenaga kerja yang terus mengalami perkembangan, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Mobilitas ini tidak semata-mata dipicu oleh dorongan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut mendorong masyarakat di daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah untuk mencari peluang kerja di luar negeri seperti di Malaysia, termasuk melalui jalur non-prosedural dengan melibatkan jaringan tertentu (Lumenta et al., 2025)

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu daerah dengan jumlah PMI terbanyak di Indonesia (Haluanntt.com, 2026). Di sisi lain, wilayah ini juga dikenal memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik perdagangan orang. Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan akses terhadap informasi yang memadai menjadi alasan utama masyarakat terlibat dalam migrasi non-prosedural (Lumenta et al., 2025). Tingkat kemiskinan NTT pada September 2025 tercatat sebesar 17,50 persen, dengan kesenjangan tajam antara wilayah perkotaan (6,96%) dan perdesaan (21,48%) (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2026). Kondisi ini menempatkan NTT sebagai provinsi ke-6 termiskin di Indonesia (NTT Pembaruan, 2025). Selain itu, IPM NTT pada tahun 2024 hanya mencapai 62,5, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 71,9, menempatkan NTT di urutan ke-33 dari 34 provinsi di Indonesia. Sebagai perbandingan, DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki

IPM yang jauh lebih tinggi, masing-masing mencapai 80,5 dan 75,3 (Flores Pos, 2025). Kondisi ini diperparah oleh rata-rata lama sekolah yang hanya sekitar 8,2 tahun, setara kelas 2 SMP (IDN Times, 2025). Pemprov NTT mencatat sekitar 145 ribu anak tidak bersekolah, dengan angka tertinggi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (IDN Times, 2025). Ombudsman RI Perwakilan NTT (2024) mengidentifikasi akar masalah tersebut mencakup tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, akses lokasi yang sulit dijangkau, kekurangan tenaga pengajar, serta fasilitas pendidikan yang tidak merata. Dengan demikian, migrasi dari NTT tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga mencerminkan adanya persoalan struktural yang lebih luas.

Proses migrasi masyarakat NTT menunjukkan karakteristik yang unik dan khas, yaitu adanya keterlibatan jaringan sosial berbasis etnis dan kekerabatan. Migrasi tidak berlangsung secara individual, melainkan melalui hubungan sosial, hubungan kekeluargaan, dan kesamaan asal daerah menjadi fondasi utama dalam proses perekrutan tenaga kerja migran. Tingginya tingkat kepercayaan dalam komunitas menjadi faktor yang dapat mempermudah proses perekrutan. Seiring berjalannya waktu, pola ini berkembang menjadi jaringan informal yang memiliki sifat sistematis, terus berulang dan berkelanjutan dalam praktik perekrutan tenaga kerja migran.

Dalam jalur migrasi tersebut, Kota Batam memiliki posisi strategis dalam jalur migrasi menuju Malaysia. Kedekatan geografis dengan negara tujuan serta kemudahan akses transportasi menjadikan Batam sebagai titik transit utama bagi PMI, terutama yang menggunakan jalur non-prosedural. Kondisi ini menjadikan

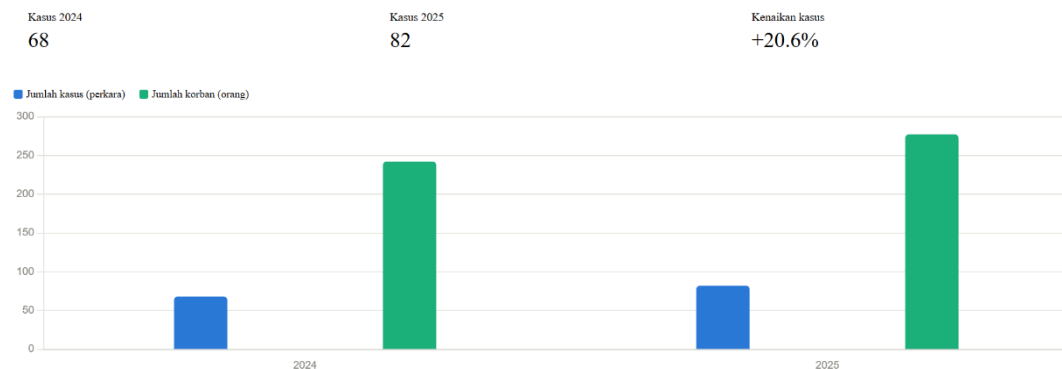
Batam sebagai pintu masuk utama juga ruang interaksi antara jaringan lokal dan jaringan internasional dalam proses migrasi (Pamungkas & Sutrisno, 2025).

Tingginya mobilitas manusia di wilayah ini, ditambah dengan lemahnya pengawasan di kawasan perbatasan, semakin memperkuat peran Batam dalam dinamika migrasi tersebut. Data Polda Kepri juga mencatat peningkatan Jumlah kasus TPPO di Kepulauan Riau dari 68 kasus pada tahun 2024 menjadi 82 kasus pada tahun 2025, atau mengalami kenaikan sekitar 20,6%. Sejalan dengan peningkatan tersebut, jumlah korban juga bertambah dari 242 orang menjadi 277 orang (Batam Pos, 2025). Kenaikan ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang masih berlangsung secara aktif dan melibatkan lebih banyak korban dibandingkan tahun sebelumnya.

Data Polda Kepri yang mencatat kasus TPPO pada tahun 2024-2025 dengan korban dari berbagai provinsi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara (Batam Pos, 2025). Lebih jauh, pengungkapan kasus pada November 2024 bahkan menemukan keterlibatan oknum PNS dari Badan Pengusahaan Batam dalam jaringan sindikat tersebut (Kompas.id, 2024), yang menegaskan bahwa jaringan kejahatan di Batam bersifat lintas wilayah dan melibatkan aktor dari berbagai sektor, baik dari instansi pemerintah maupun swasta (Detik News, 2023). Hal ini mengindikasikan adanya pola kerja yang terstruktur dalam jaringan tersebut.

Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa wilayah Kepulauan Riau, khususnya Batam sebagai daerah perbatasan dan pintu keluar menuju Malaysia, masih dimanfaatkan oleh jaringan perekrutan pekerja migran nonprosedural.

Gambar 1.1 Kasus TPPO/PMI non-prosedural



Sumber: Data resmi Polda Kepri, dikutip Batam Pos (30 Des 2025)

Lemahnya pengawasan ini tidak semata bersifat teknis, melainkan berdimensi struktural, sebagaimana dikritisi oleh Migrant CARE yang menyoroti ketiadaan pendataan akurat penumpang kapal dan lemahnya fungsi deteksi dini Gugus Tugas TPPO di wilayah perbatasan (Media Indonesia, 2025). Tidak hanya berfungsi sebagai wilayah transit, Batam juga berkembang menjadi pusat aktivitas jaringan kejahatan yang terorganisir dalam praktik migrasi ilegal (Nasution et al., 2025). Sejumlah temuan menunjukkan bahwa kota ini menjadi salah satu titik utama dalam kasus perdagangan orang dan penyelundupan migran di Indonesia, yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai wilayah (Sulistiantini & Savitri, 2025).

Melalui perspektif *transnational organized crime*, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan lintas negara yang melibatkan jaringan terorganisir dengan pembagian peran yang jelas (Nasution et al., 2025). Aktivitas yang dilakukan mencakup berbagai tahapan, mulai dari perekrutan, pengangkutan, hingga penerima di negara tujuan yang bisa saja berakibat pada eksploitasi korban, yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. TOC dipilih bukan

sekadar karena adanya kejahatan lintas negara, tetapi karena Williams (2001) secara spesifik menjelaskan bahwa jaringan TOC modern beroperasi melalui mekanisme kepercayaan berbasis komunitas-yang dalam penelitian ini terwujud melalui ikatan etnis NTT. Dengan demikian, dimensi etnis bukan hanya latar belakang sosio-budaya, melainkan variabel fungsional dalam arsitektur jaringan TOC itu sendiri.

Karakteristik utama dari kejahatan terorganisir lintas negara terlihat dari adanya jaringan yang kompleks dan saling terhubung antarwilayah. Dalam hal migrasi PMI dari NTT melalui Batam, jaringan tersebut melibatkan berbagai aktor, mulai dari perekrut di daerah asal, penghubung di wilayah transit, hingga pihak yang menerima di negara tujuan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa pola *networking* yang terbentuk tidak hanya bersifat sederhana, melainkan terstruktur dan berlangsung terus-menerus.

Periode tahun 2020–2025 menjadi fase yang penting untuk dianalisis karena adanya perubahan signifikan akibat pandemi COVID-19. Pembatasan mobilitas yang diterapkan serta tekanan ekonomi yang meningkat justru mendorong sebagian masyarakat untuk memilih jalur migrasi ilegal. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan untuk memperluas aktivitasnya (Badrudin et al., 2022).

Selain faktor pandemi, perkembangan teknologi komunikasi juga memberikan pengaruh besar terhadap pola perekrutan PMI. Pemanfaatan media sosial dan aplikasi komunikasi digital menjadi sarana baru dalam menyebarkan informasi sekaligus merekrut calon pekerja migran. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan tersebut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi (Riyansyah et al., 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek hukum, perlindungan korban, serta peran lembaga dalam menangani perdagangan orang. Sebagai contoh, penelitian oleh Dinata et al., (2023) yang lebih menitikberatkan pada pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus trafficking di Batam, tanpa mengkaji secara mendalam pola jaringan perekrutan yang terjadi. Penelitian lain oleh Sari et al., (2023) menyoroti upaya penanganan penyelundupan manusia di wilayah perbatasan Batam melalui pendekatan kebijakan dan penegakan hukum. Meskipun demikian, kajian tersebut belum secara spesifik mengaitkan fenomena tersebut dengan peran jaringan etnis dalam proses perekrutan PMI. Sementara itu, kajian yang dilakukan oleh Ananda Eddy et al., (2025) lebih menekankan pada peran organisasi internasional dalam menangani kasus perdagangan manusia di Batam. Namun, penelitian tersebut belum mengulas secara mendalam dinamika jaringan berbasis komunitas lokal sebagai aktor utama dalam proses perekrutan. Dengan demikian, aspek etnis dalam jaringan migrasi masih relatif kurang mendapat perhatian.

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian yang cukup jelas. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pola *networking* perekrutan PMI berbasis etnis masyarakat NTT dalam jalur migrasi melalui Batam menuju Malaysia. Sebagian besar studi belum menyentuh mekanisme jaringan pada tingkat komunitas. Penelitian ini menjadi menarik karena berupaya mengungkap bagaimana jaringan etnis tidak hanya berfungsi sebagai modal sosial, tetapi juga dapat menjadi bagian dari mekanisme dalam kejahatan terorganisir lintas negara. Selain itu, penelitian ini

juga akan melihat bagaimana relasi kekerabatan dapat bertransformasi menjadi instrumen dalam sistem migrasi ilegal.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi keterbatasan kajian sebelumnya dengan mengintegrasikan perspektif sosial, jaringan, dan kejahatan transnasional dalam memahami dinamika perekrutan PMI berbasis etnis asal NTT melalui jalur Batam ke Malaysia. Penelitian ini juga bertujuan memperkaya pemahaman mengenai pola *networking* berbasis etnis, baik melalui jaringan tradisional maupun digital pada periode 2020–2025, yang masih jarang dikaji secara mendalam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif terkait pencegahan migrasi ilegal dan perlindungan pekerja migran, melalui analisis terhadap pola jaringan dan aktor-aktor yang terlibat dalam proses perekrutan PMI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pola *networking* dan peran kesukuan dari perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berangkat melalui pintu Kota Batam menuju Negara Malaysia pada tahun 2020-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis serta mendeskripsikan pola *networking* perekrutan PMI asal NTT yang berangkat melalui Batam menuju Malaysia dan mengetahui fungsi kesukuan dalam penelitian ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi berupa wawasan baru yang bermanfaat bagi seluruh pihak terkait. Penelitian ini memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur akademik tentang pola migrasi tenaga kerja Indonesia, hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai acuan berharga untuk penelitian-penelitian mendatang yang berkaitan dengan pola-pola *networking* yang memanfaatkan peran kesukuan pekerja migran Indonesia yang berangkat melalui jalur Batam menuju Negara Malaysia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis/ Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman empiris dan pemahaman mendalam mengenai pola perekrutan PMI, sehingga dapat meningkatkan kemampuan analisis peneliti dalam mengkaji isu migrasi dan dinamika jaringan sosial di lapangan.

b. Bagi Pemerintah, lembaga atau organisasi yang menangani PMI (LSM/NGO, komunitas migran) dan Instansi terkait (BP2MI, Pemda NTT, Pemkot Batam, Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi,)

Temuan penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah strategis, terutama untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan memperkuat perlindungan bagi calon PMI,

serta penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas layanan, tata kelola penempatan, dan upaya penindakan terhadap praktik perekrutan ilegal termasuk upaya mengurangi keberangkatan melalui jalur yang tidak sesuai prosedur.

c. Bagi penulis lain, peneliti selanjutnya dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan dasar empiris bagi penelitian selanjutan terkait perekrutan PMI, termasuk aspek jaringan digital, perantara, dinamika transit di Batam, serta kerja sama antaraktor. Penelitian ini juga membuka peluang kajian mengenai pola perekrutan PMI di berbagai daerah dan jalur transit. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai proses perekrutan, risiko calon PMI, dan jalur aman menuju Malaysia sebagai bahan pertimbangan masyarakat sebelum bekerja di luar negeri.